

**DRAFT RINGKASAN
HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**



**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI UMUM DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH
PADA KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA**

Oleh:

**Shinta Permata Sari, SE.
Fatchan Achyani, SE., MSi.
Bayu Tri Cahya, SE.**

**DIBIYAI OLEH KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI
SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENELITIAN DOSEN MUDA DAN STUDI KAJIAN WANITA
NO. KONTRAK: 008/O06.2/PP/SP/2010**

**FAKULTAS EKONOMI, JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
SEPTEMBER 2010**

RINGKASAN PENELITIAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia membawa implikasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan tepat agar tercapai akuntabilitas publik. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu mengoptimalkan semua potensi daerah agar dapat menjadi sumber bagi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk memenuhi belanja daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Akan tetapi, pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten/Kota masih banyak tergantung pada dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi belanja daerahnya.

Esensi otonomi daerah yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin mandiri dalam membiayai belanjanya justru belum tercapai. Kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak/boros dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) daripada menggunakan kemampuan sendiri, yang diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) inilah yang disebut dengan *flypaper effect*. Fenomena *flypaper effect* semakin menarik untuk diteliti karena ternyata terjadi bukan hanya pada daerah yang memiliki PAD tinggi tetapi juga pada daerah yang memiliki PAD rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *flypaper effect* pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan mengetahui kemungkinan adanya perbedaan *flypaper effect* antara

Kabupaten/Kota yang PAD-nya tinggi dengan Kabupaten/Kota yang PAD-nya rendah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa DAU, PAD, Belanja Daerah dan Total Belanja yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa sejumlah 109 Kabupaten/Kota dalam 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2006-2008. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut diolah dengan analisis regresi linear berganda dan uji beda dengan *independent sample t-test*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *flypaper effect* pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang diketahui dari pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah yang lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Selanjutnya juga diketahui ada perbedaan *flypaper effect* antara Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang PAD-nya tinggi dengan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang PAD-nya rendah.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting, terkait dengan kebijakan pemberian DAU saat ini. Kebijakan pemberian transfer Dana Alokasi Umum diindikasikan tidak mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal, tetapi justru sebaliknya. Daerah menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap pemerintah pusat. Kemandirian daerah yang menjadi tujuan otonomi daerah justru semakin jauh dari harapan. Pemerintah pusat perlu memformulasi kebijakan pemberian DAU yang benar-benar dapat menjadi insentif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah namun disisi lain tetap bisa mengatasi persoalan konvergensi fiskal horizontal.

RENCANA PENELITIAN SELANJUTNYA

Judul: "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se Pulau Jawa) "

ABSTRAK RENCANA PENELITIAN

Pelaksanaan otonomi ternyata memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat (publik). Anggaran daerah dalam bentuk APBD, merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dibutuhkan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Daerah dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, terutama dalam hal yang berkaitan dengan belanja daerah khususnya belanja modal. Bentuk pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai dengan *agency theory*. Oleh karena itu, untuk menentukan pengalokasian belanja modal perlu mempertimbangkan beberapa potensi daerah.

Dalam beberapa temuan empiris, diketahui bahwa besarnya PAD, DAU, pertumbuhan ekonomi maupun alokasi pada tahun anggaran sebelumnya, sangat dipertimbangkan dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Peningkatan PAD, akan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan daerah untuk memenuhi belanja modalnya sendiri, dengan segala potensinya sendiri. DAU yang semakin besar justru akan membuat daerah memiliki ketergantungan

terhadap APBN. Pemerintah Daerah senantiasa berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah dengan menempatkan belanja modal yang dapat mengoptimalkan investasi modal ke daerah. Belanja modal pada umumnya merupakan belanja daerah yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran, sehingga secara kontinu akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), pertumbuhan ekonomi, dan alokasi anggaran belanja modal tahun anggaran sebelumnya terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian akan dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se Pulau Jawa untuk tahun anggaran 2006 sampai 2008.